

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERSAINGAN USAHA DALAM
PELAKSANAAN TENDER BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

ABSTRAK

HOT DION MANURUNG, SARJIT KAUR

173309010136, 173309010151

Dalam Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk dan pertimbangan KPPU untuk memutuskan perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud adalah adanya persekongkolan dalam tender yaitu praktik persaingan yang terjadi antara sesama pemeran usaha yang sebetulnya saling bersaing secara sehat dalam suatu pengadaan tender. Namun para pemeran usaha tetap melakukan tindakan persekongkolan antara sesama mereka atau bersama pemerintah. Maka dalam Penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus berinisiatif melihat bagaimana proses terjadinya suatu persekongkolan pada tender dengan bersama meneliti beragam petunjuk persekongkolan yang selalu dijumpai pada pelaksanaan tender. Serta KPPU dapat memakai Pendekatan secara Per Se Illegal untuk mencapai tujuan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta spesifikasi penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan yang akan diteliti dengan analisis kualitatif. Pelaksanaan tender barang dan jasa akan terus ada demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, untuk itu dengan adanya KPPU semoga para pemeran usaha tidak melakukan tindakan persekongkolan kembali baik persekongkolan secara horizontal, vertikal maupun horizontal dan vertikal (campuran).

ANALYSIS OF BUSINESS COMPETITION ACCOUNTABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT GOODS AND SERVICES TENDERS

ABSTRACT

HOT DION MANURUNG, SARJIT KAUR

173309010136, 173309010151

In this study, it is intended to find out and analyze how the form and considerations of the KPPU in deciding cases of Unfair Business Competition. Unfair business competition in question is the existence of conspiracy in tenders, namely the practice of competition that occurs between fellow business actors who actually compete with each other in a healthy manner in a tender procurement. However, business actors continue to carry out acts of conspiracy among themselves or with the government. So in this journal research, it can be concluded that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) must take the initiative to see how the process of conspiracy in tenders occurs by jointly examining various clues to conspiracy that are always found in tender implementation. Also, KPPU may use a Per Se Illegal Approach to achieve the objectives of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.

The method used in this study is a normative juridical approach, as well as the specifications of the research using descriptive analytical methods based on primary and secondary data sources obtained from literature studies to be examined with qualitative analysis. The implementation of tenders for goods and services will continue to exist for the sake of progress and the welfare of the community, therefore, with the existence of the KPPU, it is hoped that business actors will not carry out collusion, either horizontally, vertically or horizontally and vertically (mixed).